

DAFTAR PUSTAKA

- Didiktus, Oktavianus. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sikka.
- Elias. (2004). Kebijakan retribusi daerah :: Implementasi peraturan daerah Nomor 18 Tahun 1998 tentang retribusi Izin Mendirikan Bangunan dalam kaitan/sebagai pendapatan asli daerah Kota.
- Erdanustie, Desvan. (2014). Analisis eksistensi dan pengaruh karakteristik hubungan principal-agent terhadap nilai retribusi izin mendirikan bangunan pada kantor penanaman modal dan pelayanan terpadu kabupaten pontianak.
- Irawanto, Nanang. (2016). Faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan di Kabupaten Gunung Kidul.
- Koentjaraningrat. (1993). Metode-Metode Penelitian Masyarakat. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mardiasmo. (2022). Perpajakan (Edisi Revisi). Penerbit Andi.
- Puspita Sari, Dian. (2021). Analisis Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Pembangunan Kabupaten Mamuju.
- Sadik, Usman. (2022). Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Luwu Timur.
- Sugiono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeta.
- Sukardi. (2003). Metode Penelitian Pendidikan. Bumi Aksara.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. (2005). Metode Penelitian Pendidikan. PT Remaja Rosdakarya.
- Syukurman. (2020). Implementasi kebijakan izin mendirikan bangunan (IMB) dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kabupaten Pangkep.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Lampiran 1. Pertanyaan Wawancara terhadap Informan

1. Apa permasalahan utama pelaksanaan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kab Luwu Timur

Apa strategi penyelesaian permasalahan utama pelaksanaan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kab Luwu Timur